



Perspektif Akuntansi
Volume 4 Nomor 2 (Juni 2021), hal. 89-104
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p89-104>
<http://ejournal.uksw.edu/persi>

RESILIENSI BUMDES DALAM MENDETEKSI FRAUD DI ERA PANDEMI

Grace Phillandros Violetta ¹
Fitriyani
Ika Kristianti
Universitas Kristen Satya Wacana

Received
08/04/2021

Accepted
30/04/2021

Abstract. BUMDes was established with the aim of improving village welfare as well as creating jobs. Fraud often still occurs in the operational activities of all organizations, including BUMDes. The most potential for fraud that appears is due to revolving fund financial irregularities. The purpose of this study was to examine the resilience ability of BUMDes to detect fraud that occurred during the pandemic. This study used a qualitative method with the object of research at BUMDes Sumilen. Respondents of this study were BUMDes administrators. The data used is primary data, which is obtained from interviews with respondents. The results of this study did not have a material impact on the current pandemic conditions. Fraud and the potential for fraud do not occur frequently. BUMDes seeks deliberation when there are deviations in their operational activities. BUMDes are expected to be more sensitive in detecting fraud risks and implementing internal controls to minimize the potential for fraud that occurs so that the purpose of establishing BUMDes can be achieved.

Keywords: resiliensi, bumdes, fraud, covid-19

Abstrak. BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa juga sebagai penciptaan lapangan pekerjaan. Fraud seringkali masih terjadi dalam kegiatan operasional semua organisasi, termasuk didalamnya BUMDes, Potensi fraud yang

¹ 232017121@student.uksw.edu

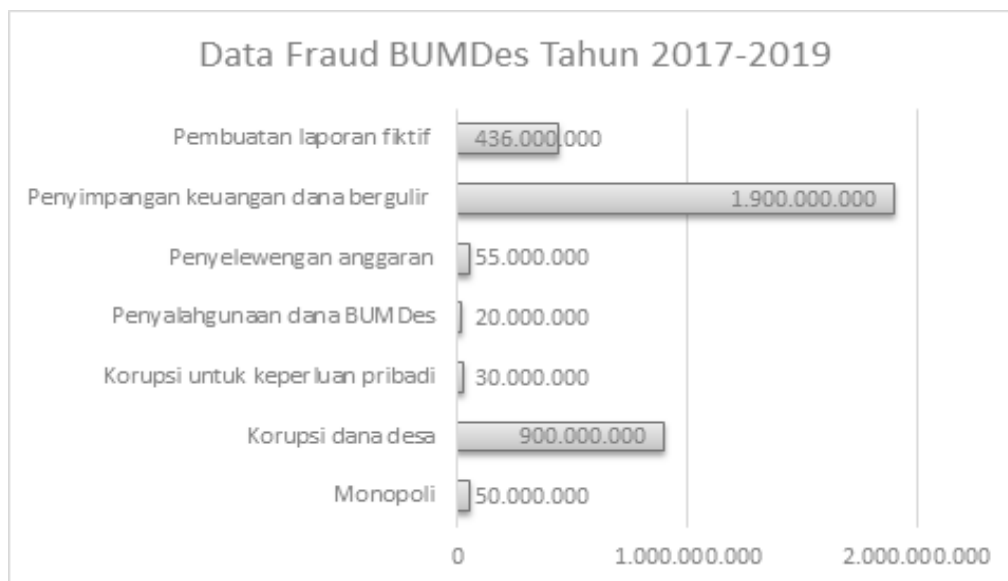
muncul terbanyak adalah dikarenakan adanya penyimpangan keuangan dana bergulir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kemampuan resiliensi BUMDes mendeteksi fraud yang terjadi selama pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian di BUMDes Sumilen. Responden dari penelitian ini adalah pengurus BUMDes. Data yang digunakan merupakan data primer, yang didapatkan dari wawancara kepada responden. Hasil dari penelitian ini tidak ada dampak yang material atas kondisi pandemi seperti saat ini. Fraud maupun potensi terjadinya fraud tidak sering terjadi. BUMDes mengupayakan musyawarah ketika terjadi penyimpangan dalam kegiatan operasionalnya. BUMDes diharapkan lebih peka dalam mendeteksi risiko fraud dan menerapkan pengendalian internal untuk meminimalisasi potensi fraud yang terjadi sehingga tujuan dirikannya BUMDes dapat tercapai.

Kata kunci: resiliensi, bumdes, fraud, covid-19

Pendahuluan

Potensi kecurangan (*fraud*) disebabkan karena masih lemahnya pengendalian internal suatu organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi masih kurang sehingga dapat menimbulkan penyelewengan dalam mengelola organisasi (Widyawati et al., 2019). Potensi kecurangan sering terjadi di berbagai lembaga organisasi, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang pasal 1 Ayat (6) Tahun 2014 menyatakan BUMDes adalah badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh modal usaha dimiliki oleh desa yang berupa kekayaan desa dan digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Kekayaan desa yang dapat digunakan tidak terbatas pada sumber daya alam, namun juga sumber daya manusia sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indrayani et al., 2019).

Sebagaimana dilansir dalam Prokal.co (2017) terdapat kasus kecurangan korupsi yang pernah dilakukan oleh Ketua BUMDes yang bergerak di unit usaha koperasi, kecurangan yang dilakukan adalah membuat laporan fiktif dengan memalsukan pinjaman dan menimbulkan kerugian senilai 900 juta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dan et al. (2019), di BUMDes unit usaha air dan sanitasi menyatakan hasil bahwa tarif air bersih antara kategori rumah tangga A, rumah tangga B dan usaha/villa tidak disamaratakan. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara masyarakat Desa Panji.



Sumber: Indrayani et al., (2019)&Widyawati et al.,(2019)

Gambar 1. Data Fraud BUMDes

Air menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan air sebagai sumber kehidupan. Air sangat diperlukan ketersediaannya di berbagai tempat dan juga harus memiliki kualitas yang baik untuk dapat meningkatkan kehidupan manusia yang lebih baik lagi (Indrayani & Astuti, 2016). Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 33 Ayat (3) dijelaskan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Berdasarkan hal tersebut hendaknya negara menggunakan sumber daya air secara bijak agar keadilan di antara masyarakat tetaplah merata.

Sampai dengan tahun 2019 layanan sumber air minum yang layak di pedesaan masih belum maksimal, menurut data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) persentase rumah tangga di pedesaan yang memiliki akses layanan sumber air minum yang layak sebesar 78,6 persen lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga di perkotaan sebesar 93,32 persen. Permasalahan tersebut masih menjadi tantangan di seluruh dunia, maka dari itu negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB merespon hal tersebut sejak Oktober 2015 dengan membuat suatu rencana aksi global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bermanfaat untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Terdapat 17 tujuan dan 169 target yang ingin dicapai oleh berbagai negara pada tahun 2030, salah satunya adalah terdapat pada tujuan no. 6 mengenai akses air bersih dan sanitasi.



Sumber: Kementerian Sosial (2019)

Gambar 2. SDGs

Tujuan hal tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk seluruh kalangan masyarakat karena manusia tidak bisa hidup tanpa air (Theron, 2016). Guna mendukung peningkatan kebutuhan jumlah air bersih pada masyarakat, beberapa BUMDes mulai membuka usaha dalam usaha aliran air bersih. Di beberapa tingkat pedesaan, terdapat BUMDes yang memiliki usaha berkaitan dengan air bersih sangat sejalan dengan SDGs no. 6 guna mendukung untuk mengurangi setengah dari jumlah proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses air bersih yang aman dan juga sanitasi dasar (Warih & Fajarwati 2006).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3. Data Pertumbuhan Air

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjamin air bersih dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk sampai ke daerah pedesaan. Salah satu BUMDes yang membuka usaha pengaliran air bersih adalah BUMDes Muara Enggelam Ramsyah yang ada di Kalimantan Timur. Di BUMDes ini pemerintah menjalankan suatu program yakni pemberian bantuan berupa sarana air bersih. Program ini bernama Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Sebelum adanya program ini, masyarakat merasa kesusahan dalam mendapatkan air bersih karena harus membeli air bersih dari desa terdekat. Bantuan dari pemerintah sangatlah bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat di desa tersebut.

Menurut Pinto et al., (2020) dijelaskan bahwa sangat diperlukan keberadaan dari BUMN maupun BUMD untuk berperan dalam penyelenggaraan sistem persediaan air minum yang memadai yakni bersih, sehat, dan juga produktif bagi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan lembaga pemerintah dapat menjalankan tugasnya tersebut dengan baik agar persediaan air minum yang ada tetap memiliki kualitas yang tinggi pula. Di era pandemi ini, BUMDes haruslah memiliki kemampuan beradaptasi agar BUMDes tersebut tetap bisa bertahan dengan kondisi seperti saat ini.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar untuk berbagai sektor usaha di dunia termasuk unit usaha BUMDes. Di Indonesia hanya dua persen dari 51.000 BUMDes yang usahanya masih bisa bertahan dalam menghadapi masa pandemi dikarenakan dalam pembangunannya di awal, BUMDes tersebut tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasar pada potensi yang dimilikinya masing-masing (Pratiwi et al., 2020). Hal tersebut dapat mengakibatkan BUMDes tidak akan bertahan lebih lama ketika terjadi suatu permasalahan seperti pada saat pandemi ini. Pratiwi et al. (2020) juga mengatakan bahwa pada saat pandemi dan sejak diberlakukannya kebijakan *work from home* mengakibatkan intensitas pemakaian air bersih menjadi meningkat secara terus menerus. Selain itu dijelaskan juga bahwa akibat adanya pandemi menyebabkan BUMDes Karya Mandiri yang terletak di Jawa Barat mengalami dampak penurunan pada omzet yang dihasilkan yakni turun sebesar 33 persen. Dampak dari adanya pandemi memang nyata adanya dan memiliki risiko yang cukup besar bagi keberlangsungan suatu BUMDes.

Berdasarkan fenomena tersebut, BUMDes perlu untuk melakukan resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan survive dari situasi maupun kondisi yang sulit. Untuk tetap mempertahankan unit usaha di BUMDes diperlukan kepekaan untuk mengikuti situasi saat ini agar BUMDes tidak menghentikan kegiatan operasionalnya. Dalam melakukan resiliensi,

perlu dilakukannya tiga hal dalam melakukan strategi adaptasi yakni aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek kesehatan (Suartana et al., 2020).

Aspek ekonomi yang dimaksud adalah adanya bantuan langsung dari pemerintah dengan melakukan registrasi ulang terhadap BUMDes yang ada. Aspek sosial dalam hal ini adalah masyarakat bergotong-royong untuk melakukan suatu perbaikan pembangunan di suatu desa dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang bisa saja terjadi. Sedangkan aspek kesehatan ialah melakukan suatu kegiatan sebagai usaha dari pencegahan maupun penanganan suatu masalah yang bisa saja terjadi. Ketiga aspek tersebut dapat direalisasikan melalui penguatan suatu BUMDes karena merupakan penopang dan pengembangan potensi kegiatan ekonomi di suatu desa. Itulah mengapa BUMDes perlu melakukan resiliensi agar kegiatan unit usaha BUMDes tetap berjalan dan tetap membantu masyarakat sekitar. BUMDes sangat berperan penting untuk masyarakat pedesaan, karena BUMDes menjadi usaha desa yang paling utama untuk menggerakkan ekonomi desa (Desa & Kuta 2018).

Pandemi Covid-19 mampu mengubah dunia dalam waktu yang singkat, BUMDes dituntut untuk melakukan inovasi agar lebih memperlihatkan BUMDes tersebut tetap memiliki gairah di tengah pandemi. Namun dengan adanya inovasi akan menimbulkan adaptasi kebiasaan baru, hal tersebut mampu membuat potensi fraud muncul karena tidak semua orang mampu beradaptasi dengan baik. Sebelum adanya inovasi, potensi fraud dimiliki oleh setiap BUMDes, maka dari itu BUMDes harus mampu mendeteksi potensi fraud baru dan perlunya tindak lanjut dari BUMDes atas potensi fraud karena adanya resiliensi.

Penelitian ini menggunakan objek BUMDES Tirto Sumilen. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di BUMDes Tirto Sumilen yang berada di Desa Karanganyar, Tuntang, Bringin, Kabupaten Semarang. Selama menghadapi pandemi pengurus unit usaha air dan sanitasi menyatakan bahwa pembagian tugas dalam hal membuat tagihan dan menerima tagihan dilakukan oleh orang yang sama, hal ini dapat menimbulkan potensi fraud yaitu manipulasi laporan. Resiliensi yang dilakukan BUMDes selama pandemi adalah mengubah kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran tagihan, jika terdapat pelanggan yang terlambat membayar maka akan diberikan surat peringatan dan apabila sudah diberikan surat peringatan ketiga namun tidak mampu membayar maka kebijakan yang diberlakukan adalah pemutusan aliran air. Sedangkan ketika pandemi tidak diberlakukan hal tersebut untuk pelanggan yang tidak mampu membayar. Hal ini mampu menimbulkan potensi *fraud* yaitu pelanggan tidak membayar tagihan karena batas waktu pembayaran maksimal tidak ditentukan oleh BUMDes dan pemutusan aliran air tidak dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kemampuan BUMDes mendeteksi fraud yang terjadi selama menghadapi pandemi dan bagaimana resiliensi BUMDes dalam menghadapi potensi fraud di unit usaha BUMDes serta ingin mengetahui implikasi ketika melakukan hal tersebut. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah BUMDes menerapkan strategi yang sesuai dengan resiliensi untuk mengatasi potensifraud yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada BUMDes untuk mengidentifikasi peluang terjadinya fraud di BUMDes sehingga BUMDes dapat mempersiapkan pengendalian yang kuat sehingga potensifraud dapat diminimalisasi.

Telaah Pustaka

Fraud

Kata *fraud* biasanya dikenal dengan istilah manipulasi, istilah manipulasi dalam kasus awam dikenal dengan penipuan (Tuanakotta, 2014) menyatakan makna dari definisi *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum yang memiliki karakteristik adanya unsur kesengajaan, penyembunyian dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun suatu organisasi. Tujuan dilakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan uang, properti atau jasa. Selain itu seseorang atau organisasi melakukan kecurangan bertujuan untuk menghindari pembayaran jasa atau kerugian serta memperoleh keuntungan diri sendiri maupun organisasi. Sedangkan menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2016) mendefinisikan *fraud* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh individu atau organisasi seperti memberikan laporan yang tidak sesuai dengan realita kepada pihak lain. Hal tersebut mampu merugikan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

BUMDes

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Sebuah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" menjadi dasar berdirinya sebuah BUMDes. Pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 Ayat (6) disebutkan bahwa sebagian besar modal BUMDes dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tujuan dari pembentukan BUMDes menurut Permendes PDTT No.4 (2015) antara lain: Meningkatkan perekonomian suatu desa, mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa, pengelolaan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan usaha masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan,

melakukan perbaikan pelayanan umum untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Resiliensi

Resiliensi merupakan suatu strategi yang harus dijalankan oleh suatu organisasi untuk tetap dapat bertahan, beroperasi, ataupun berproduksi ketika menghadapi suatu keadaan yang sulit. Strategi ini juga bisa dilakukan oleh suatu BUMDes. Strategi yang diterapkan oleh suatu organisasi harus dipikirkan secara matang dan dipersiapkan di awal agar tidak langsung menimbulkan dampak yang besar ketika terjebak dalam kondisi yang tidak diinginkan. Apabila ingin bertahan, baiknya suatu organisasi melakukan perencanaan strategi yang memungkinkan pula untuk dilakukan kedepannya.

Menurut Pratiwi et al. (2020) adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk melakukan strategi resiliensi pada suatu BUMDes adalah : membuat daftar hal-hal yang dibutuhkan dalam penentuan tujuan dan perbaikan efektivitas suatu organisasi secara baik, melakukan suatu pengembangan yang berkaitan dengan aktivitas pada suatu organisasi supaya strategi yang disusun sebelumnya dapat tercapai; selain pengembangan aktivitas, BUMDes juga harus melakukan pengembangan strategi agar tujuan yang ditetapkan di awal juga bisa tercapai; melakukan pengevaluasian terhadap strategi resiliensi yang dilakukan agar dapat ditentukan kelayakannya untuk dapat digunakan kembali pada saat kondisi sulit atau dilakukan peningkatan terhadap strategi tersebut.

Metoda

Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan dengan lebih detail mengenai keadaan BUMDes sesuai dengan realita yang terjadi. Data penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara.

Responden

Penelitian ini dilakukan di BUMDes Tirto Sumilen terletak di Desa Karanganyar, Tuntang, Bringin, Kabupaten Semarang yang bergerak di beberapa unit usaha, salah satunya adalah air dan sanitasi. Responden penelitian ini terdiri dari penanggung jawab BUMDes unit usaha air dan sanitasi serta pengurus BUMDes secara keseluruhan unit usaha.

Tahapan dan Teknik Penelitian

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, pertama adalah reduksi data, selanjutnya penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang sudah terkumpul dari narasumber untuk menyajikan informasi yang penting terkait dengan penelitian untuk menjawab pertanyaan persoalan penelitian.

Selanjutnya penyajian data yaitu mengklasifikasikan informasi penting yang didapatkan dari reduksi data berdasarkan pokok persoalan penelitian agar mudah memahami dengan jelas peristiwa yang terjadi. Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir yang berguna untuk mengambil inti dari data yang diperoleh dengan melakukan analisis guna menemukan arti data dalam menjawab persoalan penelitian (Aditya & Hapsari 2020). Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, di mana teknik ini melihat sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan keandalan dan kebenaran informasi.

Hasil dan Pembahasan

Objek pada penelitian ini adalah BUMDes Tirta Sumilen yang berdiri sejak tahun 2012. BUMDes ini berlokasi di Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Demungan dan memiliki beberapa unit usaha yaitu air bersih, listrik, simpan-pinjam dan warung. Penelitian ini lebih memfokuskan pada unit usaha air bersih. Pada tahun 2012 unit usaha air bersih dikelola secara sosial oleh masyarakat Wendo, tetapi pada tahun 2014 unit usaha tersebut diambil alih dan dikelola oleh BUMDes Tirta Sumilen. Pengurus BUMDes tersebut terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pencatat meter yang didampingi oleh Kepala Desa.

BUMDes sudah mampu mencapai tujuan yaitu mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan rakyat desa karena untuk menyalurkan air kepada masyarakat aset yang digunakan adalah aset milik desa dan pengurus sudah menganggarkan untuk perbaikan aset serta terdapat iuran dari masyarakat setiap bulannya yang digunakan untuk memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan. Pengurus BUMDes terus berusaha untuk meningkatkan layanannya kepada masyarakat desa dengan membuat kebijakan sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini. Pada saat ini pandemi Covid-19 sudah menyebar di seluruh dunia dan mampu mengubah dunia dalam sekejap. Baik itu usaha pribadi maupun organisasi terkena dampak dari pandemi ini, ada yang usahanya makin meningkat dan ada yang semakin menurun namun kebanyakan berbagai sektor usaha mengalami penurunan laba.

Pada kenyataannya usaha BUMDes dalam bidang air dan sanitasi juga mengalami dampak dari adanya pandemi ini. Pembayaran yang tersendat dikarenakan kondisi perekonomian warga juga mnejadi salah satu hambatan dalam pengelolaan usaha ini. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah, termasuk dengan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Akan tetapi, penentuan prioritas kebutuhan atas penggunaan bantuan tersebut seringkali tidak termasuk dalam penggunaan pembayaran tagihan air melalui BUMDes. Pembayaran iuran air yang sama untuk seluruh warga, dinilai cukup meringankan beban warga, jika dibandingkan dengan layanan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Iuran yang dikenakan kepada warga seringkali tidak mencukupi untuk biaya operasional, terlebih saat terjadi pandemi saat ini.

Pandemi telah menggoncang perekonomian seluruh negara, namun diharapkan Indonesia tidak terlalu terpuruk dalam menghadapi pandemi saat ini. Pemerintah telah berupaya dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Kekuatan Indonesia terletak pada usaha kecil dan menengah yang tetap berusaha dalam kondisi yang sulit ini. Termasuk dengan BUMDes yang saat ini ikut terimbas kondisi pandemi saat ini. Pemerintah telah berupaya melakukan percepatan pasca pandemi dengan adanya kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Suartana et al., 2020). Upaya yang dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait hal tersebut adalah registrasi ulang untuk seluruh BUMDes. Pemerintah tidak bisa menjamin bahwa masyarakat terhindar dari adanya bencana, namun sebagai fasilitas dalam mengupayakan meringankan imbas yang dirasakan oleh masyarakat.

Kemampuan beradaptasi BUMDes juga turut diuji dalam kondisi pandemi saat ini. Kerentanan atas kondisi perekonomian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat juga, namun BUMDes juga turut terimbas. Saat ini kemampuan dalam mengupayakan usaha tetap berjalan, serta kemampuan beradaptasi sangat diperlukan untuk dapat resilien. Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pendampingan dalam operasional BUMDes salah satunya dengan digitalisasi kegiatan operasional.

BUMDes Tirta Sumilen saat ini masih mampu mengatasi kendala selama pandemi yang ada di lapangan karena hanya ada sedikit perubahan akibat terjadinya pandemi. Kemampuan dalam menanggulangi fasilitas pengaliran air yang berkurang, perlakuan pembebasan pembayaran iuran air tidak terlalu dirasaka dampaknya pada BUMDes Tirta Sumilen. Ketika terjadi kerusakan, BUMDes sudah berinisiatif untuk melakukan pembenahan jaringan air namun terkendala atas mendesak pengalokasiannya. Kerusakan yang seringkali terjadi ini, dapat memunculkan masalah dikemudian hari dikarenakan

ketidakmampuan BUMDes dalam membenahi jaringan air. Proses penganggaran yang membutuhkan waktu sedikitnya satu tahun anggaran juga menjadi hambatan dalam perbaikan jaringan secara mendadak.

Menurut salah satu anggota pengurus BUMDes unit usaha air dan sanitasi :

“Untuk membenahan kemarin memang dialokasikan dari pemerintah desa, kemarin ada membenahan jaringan air karena juga ada biaya yang dikumpulkan sehingga dari pengurus diajukan ke desa untuk membenahan, akan tetapi karena mendesak pengalokasiannya dari desa biasanya tahun depan karena belum masuk di APBDES jadi setiap anggaran yang bisa dibiayai desa yang masuk APBDES”

Masyarakat yang menggunakan layanan unit usaha air rata-rata sudah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun lagi-lagi karena adanya pandemi ini ada masyarakat yang tidak menghasilkan uang, hal ini menyulitkan masyarakat karena air yang digunakan sehari-hari masih harus dibayarkan kepada BUMDes sehingga ada beberapa masyarakat atau pelanggan yang terlambat untuk membayar tagihan. Selain itu sekitar 15 persen pelanggan masih terlambat untuk membayar. Ketegasan BUMDes selama pandemi cukup longgar karena tidak semua mampu membayar tagihan air yang digunakan seperti hasil wawancara berikut ini :

Menurut salah satu anggota pengurus BUMDes unit usaha air dan sanitasi:

“Untuk konsumsi airnya masih normal akan tetapi ya itu pembayaran dari pelanggan agak terlambat nggeh karenakan banyak warga yang petani dan mungkin ada karyawan swasta dirumahkan untuk bayarnya agak telat”

Ketika pelanggan tidak melakukan pembayaran tepat waktu, kebijakan dari BUMDes sebelum terjadinya pandemi adalah mengeluarkan surat peringatan. Surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali kepada pelanggan dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak membayar tagihan maka pengaliran air akan diputuskan dari BUMDes ke rumah pelanggan.

Ketika pandemi menerpa, BUMDes memberikan kebijakan baru yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran yaitu meringankan beban pelanggan untuk menunda pembayaran tagihan, namun jangka waktu batas pembayaran tidak ditentukan oleh BUMDes. Potensi fraud dapat terjadi ketika penetapan batas akhir pembayaran tidak ada, serta tidak adanya peringatan yang diberikan oleh BUMDes kepada pelanggan air. Risiko atas terjadinya gagal bayar, pembayaran yang tidak lengkap, serta kelalaian petugas dalam mencatat piutang lampau bisa saja terjadi.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam pengupayaan resiliensi adalah aspek sosial. Kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari gotong

royong dalam pembangunan infrastruktur, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan sangat mempengaruhi operasional usaha BUMDes. Penetapan atas kebijakan BUMDes Tirta Sumilen dalam pelonggaran pembayaran iuran air tidak lepas dari kesepakatan yang telah dilakukan dalam rapat desa. Keputusan hasil musyawarah ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pengurus BUMDes Tirta Sumilen. Keinginan tetua masyarakat serta pengurus BUMDes adalah tidak ingin menghilangkan jati diri desa yaitu gotong royong dan musyawarah warga desa.

Menurut anggota pengurus BUMDes unit usaha air dan sanitasi :

“Kalau biasanya tiga kali tidak melakukan pembayaran akan diputus sementara tapi di masa pandemi tidak karena kita menghargai juga karena kondisi seperti ini jadi tetap disalurkan”

Kebijakan ini didasarkan pada tujuan awal didirikannya BUMDes unit air yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga sifat sosial cukup tinggi di daerah BUMDes Tirta Sumilen. Berbeda dengan penjelasan dari salah satu pengurus BUMDes secara keseluruhan.

Menurut salah satu anggota pengurus BUMDes secara keseluruhan:

“Kebijakan tersebut dibuat sejak berdiri dan beroperasi bukan karena dampak dari pandemic ini, tapi memang membantu masyarakat yang tidak mampu. Sejauh ini belum ada warga yang terlambat membayar. Tapi ada yang telat sehari atau dua hari, tapi itu gak apa-apa selama gak sampai satu atau dua bulan itu dimaklumi.”

Perbedaan mengenai batas tenggat waktu yang diberikan oleh pengurus usaha air serta pengurus usaha secara keseluruhan dapat menimbulkan potensi *fraud* pula. Ketidakkonsistenan atas kebijakan dapat menimbulkan perbedaan perlakuan kepada pelanggan. Ketika terdapat kesempatan untuk membayarkan kepada petugas yang berbeda, akan menghasilkan perbedaan perlakuan pula.

Kebijakan yang ditetapkan oleh BUMDes ini didasarkan pada keputusan melalui musyawarah bersama yang dihadiri pengurus BUMDes dan juga pelanggan. Aspirasi dari masyarakat keseluruhan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan sehingga tidak ada pihak dirugikan dan tidak menimbulkan *fraud*. Namun, ketika musyawarah dilakukan tidak semua pelanggan dapat menghadiri pertemuan yang diadakan BUMDes sehingga terdapat pelanggan yang tidak mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi karena hal tersebut hanya diberitahukan ketika pertemuan berlangsung dan notulensi dicatat oleh pengurus BUMDes.

Menurut salah satu pengurus BUMDes secara keseluruhan:

“Dengan kesibukan warga masing-masing, tidak semua warga 100 persen hadir. Musyawarah ini berguna untuk membicarakan

keberlangsungan usaha itu sendiri dan untuk hasil pertemuan ada notulensi”.

Selama pandemi BUMDes masih tetap mempekerjakan pekerja dengan jumlah yang sama dan tidak ada pengurangan pekerja. Hal itu dilakukan agar masyarakat sekitar tetap dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari melalui pekerjaan yang ada di BUMDes tersebut. Meskipun honor yang didapatkan masih tergolong kecil dikarenakan pelayanannya bersifat sosial, namun tetap saja ini menguntungkan bagi warga sekitar. Seperti paparan hasil wawancara berikut ini :

Menurut salah satu anggota pengurus BUMDes unit usaha air dan sanitasi:

“BUMDes ini sifatnya masih pelayanan, belum bergerak di bidang yang komersial seperti pelayanan air bersih itu sifatnya masih pelayanan sehingga untuk operator ataupun petugasnya itu masih ya semampunya tidak ada patokan gaji atau honor jadi sifatnya masih sosial ngeh karena kita belum mempunyai usaha yang sifatnya komersial untuk benar benar profit oriented jadi masih sifatnya sosial”

Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan BUMDes yakni menciptakan lapangan pekerjaan. Meskipun terjadi pandemi dan itu sangat menyulitkan, BUMDes tetap mewujudkan tujuannya agar kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

Petugas teknis yang membantu BUMDes dalam melakukan pengecekan secara berkala ke setiap rumah pelanggan diberikan gaji yang terbilang cukup kecil, karena gaji yang diberikan BUMDes tidak ada perhitungan mendasar untuk menetapkan gaji setiap bulannya. Pemberian insentif yang dilakukan oleh BUMDes sebesar Rp 200.000- Rp 250.000 didasarkan pada musyawarah bersama. Besaran honor ini tidak sesuai dengan UMR Kabupaten Semarang, akan tetapi ditilik dari tujuan pendirian BUMDes sudah tercapai yaitu penciptaan lapangan pekerjaan seperti hasil wawancara berikut ini:

Menurut salah satu anggota pengurus BUMDes unit usaha air dan sanitasi :

“Insentif masih sebatas sesuai kemampuan jd petugasnya insentifnya masih kecil (200.000-250.000/bln) belum ada standar atau honor UMR”

Risiko terjadinya fraud juga nampak dari tidak adanya pembagian tugas antara pencatatan dan penerima uang. Tugas mencatat penggunaan air dan menagih serta menerima uang dari pelanggan dilakukan oleh orang yang sama. Selain itu pencatatan penggunaan air setiap bulannya hanya dilakukan dengan mencatat di kertas dan kemudian dihitung, hal tersebut dapat menimbulkan risiko kehilangan ataupun kerusakan karena petugas tidak melakukan *back up* data misalnya melalui foto sehingga jika terjadi kerusakan, kehilangan data

pelanggan dapat teratasi dan mampu meminimalisasi manipulasi data penggunaan air. Berdasarkan tujuan utama didirikannya BUMDes ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga BUMDes mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada setiap pengurus BUMDes.

Menurut salah satu anggota pengurus BUMDes secara keseluruhan:

Pencatat meter berikan catatan kepada bendahara untuk penggunaan air dan bendahara membuat daftar tagihan dan petugas meteran menagih langsung kepada pelanggan. Selain itu pencatatannya masih manual ya masih pake kertas jadi dibuatkan tabel dan diisi secara manual”

Berdasarkan ketiga aspek resiliensi tersebut, perlu adanya upaya menyeluruh yang dilakukan BUMDes Tirta Sumilen dalam implementasi kebijakan yang telah diputuskan, dengan mempertimbangkan aspek potensi *fraud* yang mungkin akan dihadapi. Resiliensi merupakan perwujudan dalam upaya yang dilakukan oleh entitas dalam menunjukkan eksistensi dalam dunia usaha. Kemampuan bertahan dan penyesuaian diri atas perubahan yang terjadi diperlukan dalam dinamika bisnis. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah hendaknya tidak hanya digunakan untuk kegiatan operasional saja, namun juga untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan inisiasi ide kreatifitas dalam menjalankan kegiatan operasional. Perancangan bisnis serta pemetaan atas potensi risiko maupun *fraud* yang mungkin terjadi juga akan menambah kualitas dari BUMDes Tirta Sumilen.

Perlu adanya kerjasama antar pemangku kepentingan BUMDes dalam upaya resiliensi usaha BUMDes Tirta Sumilen. Pengelolaan BUMDes dengan apik dapat meningkatkan kemandirian BUMDes Tirta Sumilen. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi usaha yang semakin baik, dan pengurangan potensi terjadinya *fraud*. Bantuan dan program dari pemerintah atas keberlanjutan usaha BUMDes diharapkan dapat membantu perkembangan BUMDes. Diiringi dengan peningkatan kapasitas operasional serta sumber daya manusia dalam pengembangan BUMDes.

Simpulan

Pandemi Covid 19 tidak memberikan perubahan yang signifikan untuk BUMDes Tirta Sumilen karena dampak yang dialami oleh BUMDes tersebut hanyalah masalah biasa seperti kendala teknis yang dapat teratasi dengan baik, sedangkan tarif air masih sama dari sebelum terjadinya pandemic karena masyarakat desa tersebut memiliki pekerjaan yang tetap sehingga sebagian besar mampu untuk membayar tagihan. Namun sekitar 15 persen masih ada pelanggan yang terlambat untuk membayar tagihan dikarenakan mereka adalah pekerja lepas harian, strategi yang dilakukan BUMDes adalah membuat

kebijakan perpanjangan masa pembayaran dan tidak dikenakan denda serta pemutusan penggunaan air.

Dengan demikian, BUMDes dapat beradaptasi dan mengatasi masalah yang terjadi selama pandemic. Meskipun pandemi tidak memberikan dampak yang besar terhadap BUMDes, pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pengurus memiliki risiko fraud yang sebenarnya tidak disadari oleh pihak BUMDes karena rasa kepercayaan yang tinggi terhadap satu sama lain antar pengurus BUMDes. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan konfirmasi kepada pelanggan terkait dengan hasil wawancara BUMDes. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi langsung dari pelanggan dan melakukan observasi di BUMDes untuk memperkuat bukti hasil wawancara.

Daftar Pustaka

- Aditya, Y. F. P., & Hapsari, A. N. S. (2020). Local Wisdom: Can It Mitigate the Risk of Fraud? *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 18–34. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.382>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2016). Auditor Essentials, 7–10. <https://doi.org/10.1201/9781315178141-3>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Proporsi Populasi Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan. Retrieved December 11, 2020, from <https://www.bps.go.id/indicator/29/1267/1/proporsi-populasi-penduduk-yang-memiliki-akses-terhadap-layanan-sanitasi-layak-dan-berkelanjutan.html>
- Dan, B., Dana, P., Di, P., Bhuana, B., Buleleng, K., Bali, P., Anugrah, F. W., Yasa, I. N. P., Sujana, E., & Ekonomi, J. (2019). Analisis Perbedaan Dasar Perhitungan Tarif Harga Air Utama (Studi Pada BUMDes Bhuana Utama Desa Panji , Kecamatan. 263–272.
- Desa, D. I., & Kuta, T. (2018). Total jumlah kepala keluarga. 39–47.
- Dorojati, R., & Astuti, N. D. (2016). Model pelayanan air bersih perdesaan The model of rural area clean water services. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 29(317), 146–158.
- Indrayani, N. K. D., Sujana, E., & Dewi, P. E. D. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengawas, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Se-Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 158–169. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20515>
- Kementerian Sosial. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs).
- Suartana, S. I. W., Wirawan Yasa, G., Putu Wiwin Setyari, N., Gusti Ayu Purnamawati, I., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Resiliensi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi. *Agustus*, 14(2), 256–266.
- Permendes PDTT No. 4. (2015). Tujuan Pembentukan BumDes
- Pinto, M. D. R., Widodo, W., & Rachman, A. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Air Bersih Berbasis Android Dengan Menggunakan Model Prototype. *INTEGER: Journal of Information Technology*, 5(1). <https://doi.org/10.31284/j.integer.2020.v5i1.905>

Pratiwi, M. B., Novianty, I., & Kunci, K. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 26–27.

Prokal.co. (2017). Dugaan Korupsi Bumdes Dilimpahkan ke Kejari Penajam.

Theron, G. B. (2016). Sustainable development goals. *Obstetrics and Gynaecology Forum*, 26(1), 1. <https://doi.org/10.7312/sach17314-016>

Tuanakotta, T. M. (2014). Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Penerbit Salemba.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 33 Ayat (3). (2004)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1). (2004)

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (6). (2014).

Warih, H. A., & Fajarwati, A. (2006). Kajian Pengelolaan Air Berbasis Komunitas (Studi Kasus Desa Karangrejek Kabupaten Gunungkidul). 187–196.

Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.